

Political Participation of the Sapma Pemuda Pancasila Organization in Central Java Governor Election 2018

Samuel Tuah Pinto Sagala

Department of Politics and Government FISIP Undip Semarang

ABSTRACTION

Local Leaders Election or District Head Election is one of the Democracy Feast as a form of people's sovereignty to choose the leaders in an area. The Central Java Province in 2018 held the Election of Governor and Deputy Governor as the largest form of political feast in Central Java. The election of the Governor of Central Java in 2018 was attended by various groups both from parties and organizations in society. Sapma Pemuda Pancasila is one of the organizations that developed in the community and participated in Central Java Governor Elections 2018. The level and form of political participation of the Sapma Pemuda Pancasila organization is interesting to research because Sapma Pemuda Pancasila is an organization consisting of young people who are the future successors of the nation specifically in the 2018 Central Java Governor election. This study uses a mixed method research to combine descriptive qualitative and quantitative descriptive data with use Huntington and Nelson political participation theory.

The results of this research describe various forms of political participation of the Sapma Pemuda Pancasila organization in Central Java Governor Election 2018 according to Huntington and Nelson political participation theory. The conclusion of this research shows that the level of political participation of Sapma Pemuda Pancasila is quite high, it can be influenced by both internal and external factors.

Keywords: governor election, participation, politics, sapma pemuda Pancasila

PARTISIPASI POLITIK SAPMA PEMUDA PANCASILA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2020

Samuel Tuah Pinto Sagala

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang

ABSTRAKSI

Pemilihan Gubernur atau Pilkada merupakan salah satu Pesta Demokrasi yang menjadi bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di suatu daerah. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur yang merupakan bentuk pesta politik terbesar di Jawa Tengah. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 diikuti oleh berbagai macam golongan baik itu dari partai serta organisasi yang ada pada masyarakat. Sapma Pemuda Pancasila adalah salah satu organisasi yang berkembang dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018. Tingkat dan bentuk partisipasi politik organisasi Sapma Pemuda Pancasila menarik untuk diteliti karena Sapma Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang terdiri dari intelektual muda yang merupakan calon-calon penerus bangsa pada masa yang akan datang khususnya dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mixed method* guna menggabungkan data kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif dan menggunakan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson.

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai macam bentuk partisipasi politik organisasi Sapma Pemuda Pancasila pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 menurut teori partisipasi politik Huntington dan Nelson. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila adalah cukup tinggi, hal tersebut dapat dipengaruhi baik dari faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : pilgub, pemilihan gubernur, partisipasi, Politik, sapma pemuda pancasila

I. PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya Indonesia, menerapkan memilih demokrasi dalam sistem politiknya. Rakyat menjadi pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara yang didiaminya. Montesqueiu dalam trias politiknya membagi kekuasaan menjadi tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat mempunyai kewenangan untuk memilih orang-orang atau kader partai politik untuk duduk di lembaga tersebut khususnya dalam pilkada dan pemilu. Oleh karena itu orang yang duduk dalam ketiga lembaga tersebut menjadi pelayan yang bekerja demi kesejahteraan rakyat. Indonesia sendiri melaksanakan dan mendukung sistem politik yang demokratis melalui pemilihan umum (pemilu). Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan implementasi paling dasar dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, pemilihan umum menjadi langkah untuk melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif. Organisasi kepemudaan merupakan pilar terpenting dalam suatu kemajuan Bangsa karena Pemuda sebagai sosok penerus bangsa yang kelak menggantikan kedudukan golongan tua dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam sistem pemerintahan, aparaturnegara dan juga dalam sistem politik suatu Negara. Sosok pemudapun sangat diperlukan dalam tata sistem politik sebagai sosok yang diperlukan ide-ide pembaharuannya, partisi aktif dalam dunia politik untuk warna baru dalam dunia politik yang saat ini banya di dominasi para golongan tua.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1) Keith Fauls

Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*

4) **Ramlan Surbekti** memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan . Menurut Sugiyono¹metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian lainnya ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, obsevasi, tes maupun dokumentasi . Subagyo mengatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembang pemecahan terhadap segala permasalahan . Dilihat dari sudut analisisnya, menurut Saifuddin Azwar penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif

Populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu yang menjadi target penelitian yaitu anggota dan pengurus pemuda pancasila yang berdomisili di Jawa Tengah. Kemudian sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris, Anggota. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *non probability sampling*. Dimana teknik *non probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *accidental sampling*, didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul atau dengan kata lain sampel adalah individu yang mudah ditemui. Kemudian untuk menentukan sampel dalam penelitian digunakan rumus Frank Lynch berikut ini.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p(1 - p)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Z = Nilai variabel normal

1. Nilai variabel normal (2,58) untuk tingkat kepercayaan 99%
2. Nilai Variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%
3. Nilai variabel normal (1,65) untuk tingkat kepercayaan 90%

$p =$ harga patokan tertinggi (0,50)

$d =$ sampling error

1. 0,01 untuk $Z = 2,58$
2. 0,05 untuk $Z = 1,96$
3. 0,10 untuk $Z = 1,65$

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Diketahui:

$N = 750$

$Z = 1,65$ maka $d = 0,10$

$p = 0,50$

$$n = \frac{750 \cdot (165)^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}{750 \cdot (0,1)^2 + (165)^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}$$

$$= 62$$

Sehingga jumlah responden yang harus peneliti penuhi adalah sejumlah 62 responden.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka teori, penulis menggunakan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 5 yaitu :

1. Kegiatan Pemilihan
2. Kegiatan Organisasi
3. *Lobby*

4. *Contacting*

5. Tindakan kekerasan (*violance*).

Dalam sub-bab ini, penulis berusaha mendeskripsikan partisipasi politik yang dilakukan organisasi Sapma Pemuda Pancasila ke dalam lima bentuk partisipasi politik tersebut.

1. Kegiatan Pemilihan

Bentuk kegiatan pemilihan yang penulis maksudkan adalah anggota dan pengurus Sapma Pemuda Pancasila menggunakan hak pilih mereka ketika pencoblosan pada Pemilihan Gubernur Jateng 2018. Selain itu, menjadi timses atau simpatisan dari cagub-cawagub termasuk dalam kegiatan pemilihan. Berdasarkan tabel 3.20 menunjukkan bahwa 58,1 % menggunakan hak pilih mereka sedangkan 41,9% responden lainnya tidak menggunakan hak pilih mereka.

Tingginya persentase penggunaan hak pilih dari organisasi Pemuda Pancasila seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.20 alasannya yaitu beberapa dari anggota maupun pengurus organisasi Sapma Pemuda Pancasila merupakan tim sukses maupun simpatisan dalam Pilgub Jateng 2018. Sedangkan alasan adanya sebanyak 41,9 % yang tidak menggunakan hak pilih yaitu banyak disebabkan oleh pengurus dan anggota Sapma Pemuda Pancasila tidak terdaftar di DPT karena masalah administratif seperti KTP dan domisili sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Sapma Pemuda Pancasila Jateng Pak Irfan “ Ya memang beberapa anggota dan pengurus dari Sapma Pemuda Jateng berasal dari luar daerah seperti Sumatra Utara dan DKI Jakarta sehingga tidak mendapatkan hak pilih”. Selain itu alasan lainnya adalah ketidakpercayaan dari anggota dan pengurus Sapma Pemuda Jateng kepada calon akan dapat memenuhi janji-janji dalam kampanye.

Kepemilikan hak pilih menjadi salah satu faktor penting dalam partisipasi politik, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam organisasi Sapma Pemuda Pancasila dalam melaksanakan partisipasi politik.

Dari segi kampanye, partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila menunjukkan bahwa berdasarkan tabel 3.15 bahwa sebanyak 27,4% responden yang mengikuti kampanye sedangkan ada sebanyak 14,5% yang hanya menyaksikan jalannya kampanye dan 58,1 % yang tidak menyaksikan kampanye maupun ikut membantu proses kampanye. Membantu yang dimaksud adalah dengan cara mengikuti kegiatan kampanye tersebut dan membantu membagikan alat kampanye seperti brosur, kaos maupun *leaflet* dari paslon Cagub.

Banyak dari anggota dan pengurus Sapma Pemuda Pancasila yang tidak mengikuti kampanye disebabkan oleh ketidaksesuaian jadwal kampanye dengan hari atau kegiatan dari anggota dan pengurus. Seperti diketahui bahwa jadwal kampanye yang biasanya dilakukan mulai dari pagi hingga siang hari merupakan jam kerja dan kuliah dari anggota dan pengurus Sapma Pemuda Jateng sehingga tidak bisa ikut membantu proses jalannya kampanye.

Dari tabel 3.16 menunjukkan data yang menegaskan tabel 3.15 yaitu hanya 4,8% responden yang menjadi timses dari salah satu paslon. Sedangkan 19,4% responden menyatakan mereka adalah salah satu simpatisan. Dan mayoritas responden yaitu sebanyak 75,8% menyatakan mereka bukanlah simpatisan apalagi timses. Alasan banyaknya anggota dan pengurus dari organisasi Sapma Pemuda Pancasila tidak menjadi timses karena kurangnya pendekatan dari timses salah satu paslon yang mengajak untuk menjadi timses paslon.

Keaktifan anggota dan pengurus Sapma Pemuda Pancasila menjadi timses atau simpatisan ternyata dapat meningkatkan kemungkinan dirinya menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan. Dapat dilihat di Tabel 3.25 menunjukkan bahwa responden yang menjadi timses salah satu calon yang menggunakan hak pilihnya

sebanyak 3 responden (60%) ,sedangkan responden yang menjadi simpatisan yang menggunakan hak pilihnya adalah 12 responden (50%). Sedangkan responden yang sama sekali tidak menjadi timses atau simpatisan lebih banyak tidak menggunakan hak pilih mereka, 26 responden (66,2%) menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak merupakan bagian dari timses atau simpatisan dan sebanyak 21 responden (33,8%) menggunakan hak pilihnya walaupun bukan bagian dari timses atau simpatisan.

Data menunjukkan bahwa responden yang menjadi bagian dari timses dan simpatisan memiliki kemungkinan besar menggunakan hak pilih mereka dari pada responden yang tidak menjadi bagian dari timses atau simpatisan. Responden yang menjadi simpatisan tapi tidak menggunakan hak pilihnya kebanyakan karena alasan responden lebih memilih istirahat daripada datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tabel 3.26 juga menunjukkan bahwa responden yang memiliki peran dalam kampanye seperti membantu membagikan alat bantu kampanye seperti brosur, kaos, atau *leaflet* menunjukkan bahwa responden tersebut pasti menggunakan hak pilihnya. Responden yang menyaksikan kampanye juga memiliki kecenderungan yang sama, 12 responden (50%) yang menyaksikan kampanye juga menggunakan hak pilihnya sedangkan 12 responden (50%) tidak menggunakan hak pilihnya walau ikut menyaksikan kampanye. Responden yang tidak pernah mengikuti atau melihat kampanye lebih cenderung tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu 26 responden (36,4%) tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa apabila organisasi Sapma Pemuda Pancasila ini mengikuti sebuah kampanye dari paslon Pemilihan Gubernur Jateng 2018, dapat menjadi faktor yang meningkatkan kemauan untuk menggunakan hak pilihnya.

Dengan jumlah yang sedikit, maka organisasi Sapma Pemuda Pancasila dapat dipastikan sulit untuk memenangkan “ritual demokrasi” di wilayah domisili

mereka, termasuk di Pilgub Jateng 2018. Dalam praktiknya, organisasi Sapma Pemuda Pancasila cenderung mempertimbangkan penegasan terhadap ideologi negara yaitu Pancasila dalam mengambil keputusan politik tertentu.

2.Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi adalah kegiatan organisasi Sapma Pemuda Pancasila yang bersatu dan berhimpun pada satu organisasi yang memiliki kesamaan visi dan misi. Dari tabel 3.7 menunjukkan bahwa 82,3% responden tidak mengikuti kegiatan organisasi apapun, baik itu kelompok kepentingan maupun partai politik. Hanya 17,7% responden menyatakan dirinya adalah bagian dari sebuah organisasi.. Kegiatan organisasi ini juga berfungsi untuk mengambil keputusan politik seperti mendukung salah satu calon dalam pemilu.

3.Lobby

Dalam kegiatan *lobby*, organisasi Sapma Pemuda diwakili oleh Ketua Sapma Pemuda Jateng yang lebih aktif dalam melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Namun dari Sapma Pemuda Pancasila tidak mau untuk “kejar bola” dari timses calon sehingga hanya menunggu apabila ada timses dari calon yang ingin mengajak untuk membantu dan mendukung salah satu pasangan calon, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Sapma Pemuda Pancasila Jateng Bapak Irfan “Dari kami tidak ada melakukan pendekatan kepada salah satu paslon, jadi tidak kami kejar bola, kami hanya menunggu apabila ada salah satu timses paslon yang mengajak kami untuk mendukung”. Hal ini menjadi jawaban terhadap kegiatan *lobbying* yang dilakukan oleh organisasi Sapma Pemuda Pancasila.

4.Contacting

Contacting atau menghubungi politisi atau pejabat publik dilakukan oleh organisasi Sapma Pemuda Pancasila, tapi sama halnya dengan *lobbying*, hanya dilakukan oleh

pemimpin dari organisasi Sapma Pemuda Pancasila. Pengambilan sikap pasif dalam *lobbying dan contacting* yang dilakukan oleh organisasi pemuda Pancasila menerangkan bahwa tidak adanya proses *contacting* yang dilakukan secara menyeluruh dari organisasi, namun tidak diketahui pasti apabila ada salah satu anggota yang melakukan kegiatan *contacting*. Hal ini membuat partisipasi politik melalui kegiatan *lobbying dan contacting* membuat organisasi Sapma Pemuda Pancasila dinilai cenderung pasif

5. Tindakan Kekerasan (*Violance*)

Violance dalam partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dapat berupa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok. Dari Tabel 3.24 menunjukkan mayoritas responden pernah mengikuti atau menyuarakan aspirasi organisasi Sapma Pemuda Pancasila melalui kegiatan demonstrasi. Sebanyak 46 responden (76,2 %) menyatakan pernah mengikuti demonstrasi guna menyuarakan aspirasi Sapma Pemuda Pancasila sedangkan 16 responden (23,8%) tidak pernah mengikuti kegiatan demonstrasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian tentang Tingkat Partisipasi Politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018 adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018 yang paling umum adalah kegiatan pemilihan. Bentuk partisipasi politik pemilihan atau pencoblosan dapat dinilai cukup baik mengingat mayoritas dari anggota dan pengurus Organisasi Sapma Pemuda Pancasila menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018 adalah faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal yang paling berpengaruh adalah kesadaran politik dan tingkat pendidikan yang akan mendorong kesadaran politik, sedangkan faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah peranan pemerintah untuk melakukan sosialisasi pemilu dan melakukan pendataan pada anggota dan pengurus Sapma Pemuda Pancasila serta perilaku dari Paslon Cagub-cawagub yang ada dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2018 kurang memperhatikan Organisasi Sapma Pemuda Pancasila.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran untuk pihak yang dapat memengaruhi partisipasi politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila yaitu :

Saran untuk KPU Jawa Tengah

Melakukan sosialisasi kepada anggota dan pengurus Sapma Pemuda Pancasila. Kehadiran negara dimana dalam konteks ini adalah KPU Provinsi Jawa tengah dalam organisasi yang merupakan intelektual muda sangat penting untuk mendorong partisipasi politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila dan masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan bantuan dari pimpinan Organisasi Sapma Pemuda Pancasila agar mudah untuk mengumpulkan seluruh anggota dan pengurusnya.

Saran untuk Pemerintah Jawa Tengah

Rekomendasi untuk pemerintah Jawa Tengah yang penulis sarankan adalah terus melakukan pendataan Organisasi Sapma Pemuda Pancasila dengan cara mendatangi

Organisasi Sapma Pemuda Pancasila lalu berusaha mendaftarkan anggota dan pengurus tersebut agar memiliki eKTP.. Cara yang mungkin efektif adalah datang langsung ke acara-acara yang dibuat oleh Sapma Pemuda Pancasila agar merasa pemerintah hadir dan dengan adanya ektp sehingga adanya jaminan bahwa anggota dan pengurus Sapma Pemuda Pancasila terdaftar di DPT dan meningkatkan kemungkinan menggunakan hak suaranya.

Perlu adanya perbaikan dalam masyarakat maupun pemerintah agar meningkatkan kepedulian terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang selama ini diabaikan dan dianggap sebagai beban bagi bangsa. Pentingnya sosialisasi dan pembimbingan dari pemerintah terhadap berbagai organisasi masyarakat agar dapat membantu program-program yang dilakukan pemerintah yang salah satunya yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Saran untuk Organisasi Sapma Pemuda Pancasila

Bagi organisasi Sapma Pemuda Pancasila, perlu adanya kemauan untuk berubah dan meningkatkan partisipasi politik terutama di era modern dimana banyak dari kaum muda lebih memilih untuk tidak peduli terhadap dunia politik. Perlu adanya peningkatan kesadaran diri bahwasannya generasi muda saat ini adalah ujung tombak bangsa di masa yang akan datang nanti.. Kemauan untuk mengurus ektp juga sebuah keniscayaan untuk perubahan peningkatan sehingga Organisasi Sapma Pemuda Pancasila dapat menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi memperjuangkan kepentingan organisasi Sapma Pemuda Pancasila itu sendiri. Pemimpin dari organisasi Sapma Pemuda Pancasila perlu lebih untuk memberikan pemahaman politik kepada anggota dan pengurusnya sehingga nantinya muncul kesadaran secara mandiri tumbuh di dalam organisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Birch, A.H. 2003. *Nationalism and National Integration*. London: Unwin Hyman
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Changara, Hafied. 2015. *Komunikasi Politik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitan dan Aplikasinya*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hutabarat, Martin. 2012. *Hukum dan Politik Indonesia : Tinjauan Analisis Dekrit Indonesian Perspective* Vol. 1, No. 2. 2016.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitan dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, M. Imaduddin. "Demokrasi Politik Minoritas di Indonesia." *Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* Vol. IV. No. 2. 2013.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. 2000. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- P, Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Samah, Kristin. 2014. *Berpolitik Tanpa Partai*, Jakarta: PT GramediaPustaka Utama
- Setiadi, Elly M., Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Pernanda Metia Group
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia